

Tanggung LNG: Proyek Besar, Risiko Gede



Tanggung LNG: Proyek Besar, Risiko Gede

September 2025

Publikasi oleh Trend Asia dan Recourse berkolaborasi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI / Friends of the Earth Indonesia), debtWATCH Indonesia, Friends of the Earth Japan dan the Big Shift Global coalition.

Penulis: Novita Indri dan Marjorie Pamintuan.

Laporan ini telah diperkuat secara signifikan berkat masukan dan saran berharga dari: Dwi Sawung dari WALHI, Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia, dan Hozue Hatae dari Friends of the Earth Japan.

Laporan ini juga telah menerima masukan dari Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank dan the International Finance Corporation, tinjauan dan tanggapan mereka tidak berarti dukungan.

Informasi lebih lanjut mengenai masalah yang diangkat dalam laporan ini, silahkan hubungi:

Recourse, Kraijenhoffstraat 137A, 1018 RG, Amsterdam, The Netherlands, info@re-course.org

Publikasi ini digunakan secara tidak berbayar dengan tujuan untuk advokasi, kampanye, edukasi, dan penelitian, dengan syarat sumbernya disebutkan secara lengkap. Kami meminta agar semua penggunaan semacam itu didaftarkan kepada kami untuk tujuan penilaian dampak.

Sampul Foto: BP Tangguh berlokasi di Teluk Bintuni. Foto oleh Environmental Justice Atlas.

Recourse adalah organisasi non-profit/nirlaba yang terdaftar di Eropa, yang berjuang untuk dunia di mana masyarakat, dan planet menjadi pusat pembangunan. www.re-course.org

Trend Asia adalah organisasi masyarakat sipil independen yang terdaftar di Indonesia, yang bergerak sebagai akselerator transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia.

<https://trendasia.org/>

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	4
Latar Belakang	6
Partisipasi Bank-bank Pembangunan Multilateral dalam Pendanaan Tangguh LNG	9
Pinjaman Proyek Langsung ADB	9
Pendanaan tidak langsung bank-bank pembangunan multilateral pada proyek TangguhLNG	10
Metodologi Keselarasan Paris Bank-Bank Pembangunan Multilateral dan Kebijakan Sektor Energi yang Tidak Sesuai	11
Jebakan Tangguh: Bagaimana risiko gas mengalihkan transisi energi Indonesia	13
Dampak Kehadiran Tangguh LNG	16
Penggusuran dan Dampak Sosial-Ekologi bagi Masyarakat Adat	16
Naiknya emisi gas rumah kaca	17
Kesimpulan dan Rekomendasi	19
Referensi	21



BP Tangguh berlokasi di Teluk Bintuni. Foto oleh Environmental Justice Atlas.

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah, termasuk Indonesia, dan bank-bank pembangunan multilateral telah berkomitmen untuk mencapai Perjanjian Paris demi membatasi pemanasan global hingga 1.5 derajat Celcius di atas level pra-industrial. Hal ini membutuhkan penghentian bertahap penggunaan energi fosil dan bertransisi ke sistem energi terbarukan. Sayangnya, pemerintah Indonesia dan bank pembangunan multilateral tidak mematuhi komitmen tersebut.

Februari 2025, konstruksi fasilitas produksi keempat (train 4) *liquefied natural gas* (LNG) dan fasilitas sistem penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan (CCUS) akan menjadi bagian dari proyek LNG Tangguh Indonesia, yang juga diintensifikasi sebagai salah satu dari beberapa beberapa "proyek prioritas minyak dan gas skala besar" selama masa jabatan Presiden Prabowo saat ini.¹

Tangguh LNG adalah perusahaan ekstraksi gas alam dan produsen LNG terbesar di Indonesia yang terletak di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek ini mayoritas dimiliki dan di sepenuhnya dikelola oleh British Petroleum Berau (BP Berau). Perusahaan induknya ialah British Petroleum (BP), yang tercatat secara historikal menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca (GRK) tertinggi di antara entitas sektor swasta

lainnya.² Proyek Tangguh LNG dikembangkan, dan terus menjalankan bisnisnya di wilayah yang ditandai dengan konflik dan kekerasan bersenjata. Fase konstruksinya pada 2005 mengakibatkan tergesurnya komunitas adat setempat dari kampung mereka dan kehilangan akses ke tempat berburu dan memancing tradisional mereka.

Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan International Finance Corporation (IFC)-- anak usaha dari grup Bank Dunia, masih belum menyatakan komitmen publik untuk mendanai konstruksi fasilitas produksi keempat (train 4) dan fasilitas CCUS di Tangguh. Namun, sebelumnya mereka telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam mendanai konstruksi proyek LNG Tangguh dan ekspansi fasilitas produksi kedua (train 2) dan ketiga-nya (train 3), termasuk melalui perantara keuangan.

Proyek LNG Tangguh telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak terduga, pelanggaran HAM dan kenaikan emisi gas rumah kaca. Perluasan proyek ke fasilitas produksi keempat (train 4) akan memperparah dampak iklim dan menunda Indonesia untuk beralih ke energi terbarukan. Sayangnya, kebijakan terkait energi dan Metodologi Keselarasan Paris (*Paris Alignment methodologies*) dari bank-bank pembangunan

multilateral saat ini masih memiliki banyak celah yang tidak menghalangi investasi di masa mendatang untuk mendanai proyek seperti train 4 dan fasilitas CCUS. ADB dan Bank Dunia saat ini sedang proses meninjau kebijakan energi mereka, dan AIIB dalam waktu dekat akan segera memulai proses serupa (selambat-lambatnya pada 2027), memberikan peluang bagi bank-bank tersebut untuk memperkuat komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris dan sepenuhnya secara langsung maupun tidak langsung mengeluarkan investasi mereka dalam gas fosil.

Berdasarkan bukti di bawah ini, laporan ini merekomendasikan bahwa:

- **Bank-bank pembangunan multilateral tidak boleh mendanai ekspansi proyek Tangguh LNG ke fasilitas produksi keempat (train 4) dan fasilitas CCUS.** Sebagai gantinya, mereka seharusnya membantu Indonesia beralih dari energi fosil dan membangun kapasitas yang lebih besar untuk energi terbarukan yang berkelanjutan, aksesibel, dan sepenuhnya terbarukan.
- **Bank-bank pembangunan multilateral harus meninjau portofolio klien perantara keuangan mereka dan mendorong untuk keluar dari semua energi fosil, termasuk gas fosil.** Bank-bank tersebut harus menutup celah dalam pembiayaan perantara keuangan mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak akan mendukung ekspansi proyek Tangguh LNG ke train 4 dan fasilitas CCUS, dan juga termasuk ke proyek gas fosil lainnya.
- **Bank-bank pembangunan multilateral harus berkomitmen untuk mengakhiri semua pendanaan untuk energi fosil,** termasuk melalui lembaga perantara keuangan. Pada saat yang sama, para bank tersebut harus menghentikan narasi 'gas sebagai energi transisi' dan sebaliknya berkomitmen untuk meningkatkan

pendanaan publik guna mendukung percepatan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan

- **Bank-bank pembangunan multilateral harus memperkuat mekanisme perlindungan dan akuntabilitas untuk menjamin hak-hak komunitas yang terdampak dan melindungi iklim.**

Proyek Tangguh LNG dapat dilakukan melalui pelaksanaan audit independen dan transparan terhadap proyek tersebut dengan melibatkan partisipasi kelompok masyarakat adat Papua dan masyarakat sipil.

Peninjauan Kerangka Kerja Berkelanjutan (Sustainability Framework) IFC yang sedang berjalan harus memperkuat Standar Kinerja (Performance Standards/ PS)³ yang ada untuk memastikan IFC tidak akan mendanai proyek-proyek yang akan berkontribusi memperburuk iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan hutan, termasuk melanggar hak-hak masyarakat adat.

Sebuah Standar Kinerja (PS) baru untuk pembiayaan perantara keuangan yang akan meningkatkan transparansi dan pengungkapan, menilai risiko iklim, menghentikan penggunaan energi fosil, dan memperkuat akses komunitas terhadap pemulihan harus segera diadopsi. Peninjauan yang sedang berlangsung terhadap mekanisme akuntabilitas ADB dan AIIB harus menghasilkan pertanggungjawaban bagi komunitas yang terdampak, khususnya dengan mengurangi hambatan akses dan memungkinkan mekanisme tersebut untuk secara proaktif melakukan penyelidikan dalam kasus di mana ruang gerak masyarakat sipil sangat terbatas.

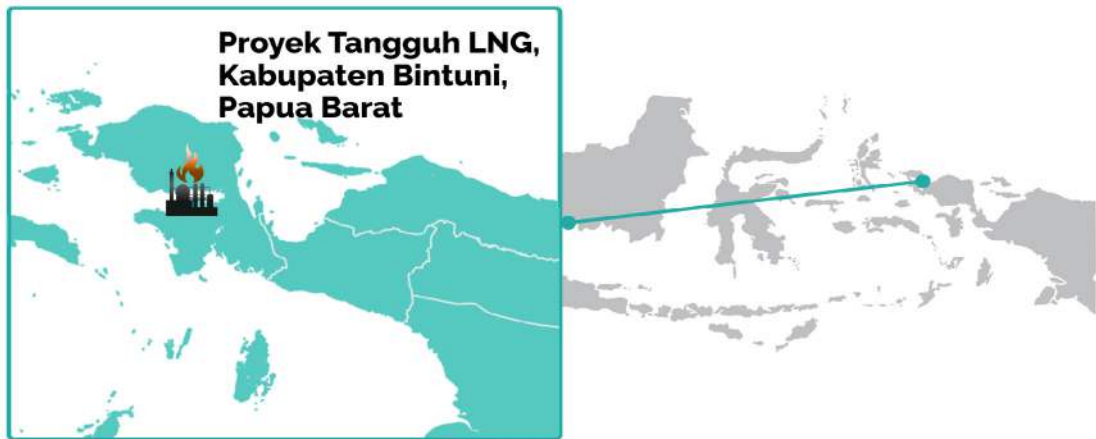


Pemandangan yang tenang di Papua, Indonesia. Foto oleh Adiardi Zulfansyah.

Latar Belakang

Wilayah Papua, Indonesia, merupakan kawasan keanekaragaman hayati yang terancam dengan industri ekstraktif dan krisis iklim. Hutan alamnya mencakup sekitar 24,5 juta hektare—membentang lebih dari 78% luas daratan tanah Papua. Hutan-hutan yang luas berperan sebagai penyerap karbon, mampu menyerap sekitar 52 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) dari atmosfer setiap tahunnya (setara dengan emisi tahunan Singapura).⁴ Namun, ekosistem yang kaya tersebut sedang dihancurkan secara cepat demi ekspansi industri ekstraktif seperti tambang, pembukaan hutan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan pertanian skala besar, dan proyek gas fosil.⁵ Pada 2024, hilangnya 136.00 hektare hutan alami diperkirakan telah melepaskan sekitar 10.7Mt emisi CO₂ ke atmosfer.⁶

Tanggung LNG adalah perusahaan ekstraksi gas alam dan produsen LNG terbesar di Indonesia yang terletak di Teluk Bintuni, Papua Barat (lihat gambar 1). Proyek ini mayoritas dimiliki dan sepenuhnya dikelola oleh British Petroleum Berau (BP Berau). Perusahaan induknya ialah British Petroleum (BP), yang tercatat secara historikal menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca (GRK) tertinggi di antara entitas sektor swasta lainnya.⁷ Fase konstruksinya pada 2005 mengakibatkan tergusurnya komunitas adat setempat dari kampung mereka dan kehilangan akses ke tempat berburu dan memancing tradisional mereka.⁸ Dengan tiga unit train produksi LNG yang saat ini telah beroperasi (lihat kotak 1), ladang gas ini merupakan yang terbesar di Indonesia dan produsen LNG terbesar, dengan total kapasitas produksi mencapai 11,4 juta mtpa.⁹



Gambar 1: Peta wilayah Papua, tunjukkan Provinsi Papua Barat dan lokasi Tangguh LNG

Emisi Tangguh LNG dari antara tahun 2010 hingga 2015¹⁰ diperkirakan mencapai 5 mtpa CO₂e dan diperkirakan akan meningkat hingga 8 mtpa CO₂e setelah produksi LNG train ketiganya (train 3) beroperasi¹¹ pada 2023. Estimasi-estimasi di atas empat kali lebih besar dari emisi negara tetangga, Timor Leste yang hanya 2.01 mtpa CO₂e pada 2022.¹² Emisi Tangguh LNG memperparah krisis iklim, yang mengancam salah satu *landmark* alam paling ikonik tanah Papua—gletser es terakhir yang tersisa di puncak Pegunungan Jayawijaya, yang terletak membujur di antara Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Luas gletser mencapai 19,3 kilometer persegi pada 1850, tetapi telah menyusut hingga tersisa hanya 0,5 kilometer persegi pada 2018. BMKG memprediksi 'salju abadi' tersebut akan benar-benar hilang pada 2026 jika tren pemanasan terus terjadi.¹³

Hal ini mengirimkan pesan kuat bahwa krisis iklim bukan sesuatu yang akan terjadi pada masa depan, tetapi sedang terjadi saat ini dan ancaman nyata yang mengancam kehidupan masyarakat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemerintah, termasuk Indonesia, dan bank pembangunan multilateral telah berkomitmen untuk mencapai Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global hingga 1.5 derajat Celcius di atas level pra-industrial.

Hal ini membutuhkan penghentian bertahap energi fosil dan bertransisi ke sistem energi terbarukan.

Namun, pemerintah Indonesia dan bank-bank pembangunan multilateral belum meningkatkan komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris. Pada Februari 2025, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa akan memprioritaskan penyelesaian beberapa proyek migas skala besar,¹⁴ termasuk proyek fasilitas produksi keempat (train 4) milik Tangguh LNG.¹⁵ Perluasan proyek ini akan meningkatkan kapasitas fasilitas produksi LNG tersebut, sekaligus ikut meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, menghambat transisi ke energi terbarukan dan memperburuk krisis iklim.

Sementara belum ada bank-bank pembangunan multilateral yang membuat komitmen publik untuk tidak mendanai pembangunan fasilitas produksi keempat (train 4) milik Tangguh, nyatanya dulunya mereka telah terlibat dalam mendukung konstruksi dan ekspansi Tangguh LNG. Asian Development Bank (ADB) memberikan utang sekitar 350 juta dolar pada 2005 untuk mendukung fase konstruksi, dan 400 juta dolar lainnya pada 2016 untuk mendukung pembangunan fasilitas produksi ketiga (train 3). Anak usaha Grup Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC), dan

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), di sisi lain, secara tidak langsung mendukung konstruksi fasilitas produksi ketiga (train 3) antara tahun 2016 dan 2024 melalui investasi yang dibuat melalui klien perantara keuangan mereka.



Pembangunan fasilitas produksi keempat (train 4) Tangguh LNG akan meningkatkan produksi LNG dan memperpanjang masa operasional proyek. Usulan fasilitas penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan (CCUS), yang akan dikembangkan bersamaan dengan fasilitas produksi keempat (train 4), akan semakin membenarkan peningkatan penggunaan LNG dan menunda transisi Indonesia ke energi terbarukan. Sayangnya, kebijakan energi dan Metodologi Keselarasan Paris (*Paris Alignment methodologies*) milik bank-bank pembangunan multilateral belum dapat mencegah mereka untuk berinvestasi dalam proyek fasilitas produksi keempat (train 4) Tangguh.

Perjanjian Paris, yang mulai berlaku pada November 2016, seharusnya menjadi momen bagi para bank pembangunan multilateral untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam proyek tersebut. Namun, bank-bank tersebut bergerak lambat dalam berkomitmen untuk menyelaraskan aliran keuangan mereka dengan Perjanjian Paris guna membatasi pemanasan global hingga 1.5 derajat Celcius di atas level pra-industrial. Setelah mereka bersepakat bersama tentang penyelarasan dengan Perjanjian Paris pada 2017¹⁶, bank-bank pembangunan multilateral baru mampu menyepakati seperangkat prinsip-prinsip metodologi tentang cara melakukannya pada 2023, enam

tahun berselang.¹⁷ Selain itu, prinsip-prinsip ini lemah dan tidak sepenuhnya selaras dengan target 1,5°C, yang masih memungkinkan bank-bank pembangunan multilateral untuk terus berinvestasi di gas fosil dengan dalih beralih ke energi yang 'lebih bersih'.

ADB dan Bank Dunia saat ini sedang proses meninjau kebijakan energi mereka, dan AIIB dalam waktu dekat akan segera memulai proses serupa (selambat-lambatnya pada 2027), memberikan peluang bagi bank-bank tersebut untuk memperkuat komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris. Hal ini dapat dilakukan dengan mengecualikan dukungan secara langsung dan tidak langsung untuk gas fosil, dan memastikan solusi palsu seperti CCUS, yang hanya akan memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil, tidak didukung oleh bank-bank tersebut.

Partisipasi Bank-bank Pembangunan Multilateral dalam Pendanaan Tangguh

Tangguh LNG adalah perusahaan ekstraksi gas alam dan produsen LNG terbesar di Indonesia yang terletak di Teluk Bintuni, Papua Barat (lihat gambar 1). Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan enam lapangan gas terpadu yang berlokasi di Berau, Muturi dan Wiriagar.¹⁸

Proyek konstruksi dan ekspansi Tangguh LNG didanai oleh tiga bank pembangunan multilateral — ADB, IFC, dan AIIB. Lembaga kredit ekspor (*export credit agencies*) seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan KfW, serta bank komersial internasional lainnya seperti Mizuho Bank, Bank of China, China Construction Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, DBS Bank, United Overseas Bank (UOB), BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank dan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), juga turut terlibat.

Pinjaman Proyek Langsung ADB

Pada Desember 2005, ADB mendukung pembangunan Tangguh LNG melalui pinjaman 350 juta dolar ke Hongkong and Shanghai Banking Corporation USA, National Association (HSBC Bank USA, N. A.), yang bertindak sebagai wali (*trustee*), atau peminjam dan agen

pembayaran untuk proyek tersebut.¹⁹ Pinjaman tersebut mendukung pengembangan fase pertama proyek tersebut,²⁰ yang terdiri dari dua anjungan lepas pantai yang mengakses lapangan gas raksasa Jurassic Vorwata untuk memasok gas ke fasilitas produksi pertama (train 1) LNG dan fasilitas produksi kedua (train 2) LNG.²¹ Masyarakat sipil Indonesia dan Papua menentang proyek tersebut dan mengemukakan kekhawatiran akan polusi, hilangnya akses ke wilayah perikanan tradisional dan militerisasi, di antara isu-isu lainnya, di Papua Barat, kepada manajemen dan pemilik saham ADB. Namun, manajemen membenarkan pinjaman tersebut, dengan mengutip kontribusi terhadap 'pertumbuhan ekonomi berkelanjutan' bagi Indonesia²² dan menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan menyediakan "LNG yang ramah lingkungan" ke negara-negara tetangga.²³

Pada Desember 2016, ADB menandatangani pinjaman lainnya senilai 400 juta dolar untuk mendukung perluasan proyek Tangguh LNG.²⁴ Pinjaman tersebut untuk mendanai pembangunan fasilitas produksi ketiga (train 3), serta 29 km panjang pipa gas di bawah laut dan dua kondensat dan dermaga angkut untuk mengangkut LNG.²⁵

Kotak 1. Apa itu train LNG?

Train LNG adalah sebuah unit pengolahan yang memproduksi LNG. Unit ini terdiri dari serangkaian pipa yang saling terhubung, kompresor, turbin dan komponen lainnya untuk memurnikan, mendinginkan, dan mengubah gas alam menjadi LNG.



Gambar 2. Diagram sederhana rantai produksi LNG

Pendanaan tidak langsung bank-bank pembangunan multilateral pada proyek Tangguh LNG

ADB, IFC, dan AIIB memiliki dukungan tidak langsung terhadap perluasan proyek Tangguh LNG antara tahun 2016 hingga 2024. Dukungan tidak langsung ADB dan IFC ke proyek ekspansi Tangguh LNG melalui lembaga perantara keuangan mereka, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Sementara itu, pendanaan tidak langsung AIIB untuk proyek tersebut dilakukan melalui investasinya dalam sekuritas utang infrastruktur, Bayfront Infrastructure Capital IV.²⁶

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) didirikan pada 2010 oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investasi dalam proyek infrastruktur kemitraan pemerintah dan swasta di negara itu. Perusahaan ini didirikan dengan investasi saham dari PT Sarana Multi Infrastruktur, ADB, IFC dan Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), yang dimiliki oleh KfW. Pada 2009, ADB²⁷ dan IFC²⁸, keduanya menandatangani investasi ekuitas terpisah sebesar 40 juta dolar untuk berkontribusi mendirikan IIF. Pada 2012, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) bergabung dalam daftar kepemilikan saham. Gambar 3 menunjukkan status kepemilikan saham saat ini dari IIF.

IIF telah mendanai beberapa proyek migas di Indonesia, termasuk fasilitas produksi ketiga (train 3) proyek Tangguh LNG. Pada 2016, IIF berpartisipasi sebesar 3,75 miliar dolar dalam sindikasi pinjaman untuk mendanai proyek tersebut, bersama dengan bank-bank lainnya seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.²⁹

AIIB, di sisi lain, mendukung perluasan untuk membangun fasilitas produksi ketiga (train 3) Tangguh LNG melalui investasinya dalam sekuritas utang infrastruktur yang diterbitkan oleh Bayfront Infrastructure Capital IV (BIC IV),³⁰ yang diterbitkan pada September

2023.³¹ Pada Agustus 2023, AIIB menyetujui investasi 80 juta dolar³² untuk BIC IV. Dokumen Penyingkapan (*disclosure documents*) BIC IV menunjukkan bahwa utang train 3 Tangguh sebesar 5 juta dolar yang jatuh tempo pada 2029 termasuk dalam portofolionya.

Halaman informasi proyek AIIB untuk BIC IV telah diperbaharui dengan kalimat yang menyatakan "per 1 November, 2024, AIIB hanya memegang obligasi kelas A1-SU (bagian keberlanjutan)", menyiratkan bahwa AIIB tidak terpapar pada proyek energi fosil seperti Tangguh. Namun, partisipasi AIIB dalam bagian konvensional BIC pada masa lalu dan kepemilikan sahamnya yang berlanjut di Bayfront Infrastructure Management secara keseluruhan membantu meningkatkan kepercayaan investor lain (dan oleh karena itu partisipasi mereka) dalam penerbitan ini. Bayfront Infrastructure Management (BIM), yang menjadi sponsor sekuritas utang infrastruktur diterbitkan melalui BIC, dimiliki AIIB sekitar 30% melalui investasi ekuitas sebesar 54 juta dolar pada 2019.³³

Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa bank-bank pembangunan multilateral telah memainkan peran penting dalam pendanaan berbagai komponen proyek Tangguh LNG, baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan berkontribusi ke pendanaan proyek tersebut, bank-bank ini oleh karena itu turut bertanggung jawab atas dampaknya.



Gambar 3. Struktur Kepemilikan Saham IIF³⁴

Metodologi Keselarasan Paris Bank-Bank Pembangunan Multilateral dan Kebijakan Sektor Energi yang Tidak Sesuai

Meskipun telah berkomitmen untuk selaras dengan Perjanjian Paris dan mengurangi dampak krisis iklim, kebijakan yang berlaku saat ini di ADB, AIIB, dan IFC tidak serta merta akan mencegah mereka dari mendanai Tangguh LNG, termasuk fasilitas produksi keempat (train 4) dan fasilitas CCUS, pada masa depan. Celah-celah ini harus diperbaiki untuk memastikan bank-bank pembangunan multilateral berhenti berkontribusi pada kerusakan iklim dan deforestasi.

Bank-bank pembangunan multilateral bergerak lambat dan tidak sesuai dalam penyelarasan pendanaan mereka dengan Perjanjian Paris. Butuh delapan tahun pasca mengadopsi Perjanjian Paris pada 2015 bagi mereka meluncurkan Prinsip Metodologis Bersama Bank-bank pembangunan multilateral untuk Penilaian Kesesuaian dengan Perjanjian Paris pada Juni 2023. IFC mengadopsi metode bersama ini, sementara AIIB menerbitkan versinya sendiri sebulan kemudian, yang didasarkan pada prinsip bersama tersebut.³⁵ ADB, di sisi lain, belum secara resmi merilis panduan implementasi prinsip tersebut.³⁶

Namun, baik metodologi bersama para bank pembangunan multilateral ataupun versi AIIB masih jauh dari memadai, karena keduanya masih memperbolehkan dukungan terhadap gas fosil. AIIB, contohnya, membuat investasi sebesar 80 juta dolar dalam sekuritas yang diterbitkan oleh Bayfront Infrastructure Capital IV hanya satu bulan setelah mengklaim bahwa semua investasi barunya akan sepenuhnya selaras dengan Perjanjian Paris dari Juli 2023.³⁷ Gas fosil tidak termasuk dalam daftar yang dikecualikan (investasi yang tidak

sepenuhnya selaras dengan Perjanjian Paris), yang berarti bahwa bank-bank pembangunan multilateral dapat terus berinvestasi dalam proyek gas. Selain itu, proyek gas fosil masih dapat dianggap 'selaras Paris' selama mereka masih konsisten dengan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) dan *Long-Term Strategies* (LTS) negara tempat investasi tersebut berlokasi, meskipun jika NDCs dan LTS ini tidak sejalan dengan target 1.5°C dari Perjanjian Paris.

Metodologi Penyelarasan Paris yang lemah ditambah dengan kebijakan energi mereka yang sama-sama ramah terhadap gas fosil, yang mempromosikan gas sebagai 'bahan bakar transisi'. Bank Dunia, AIIB, dan ADB telah membatasi dukungan mereka untuk gas fosil ke proyek-proyek hulu dan hilir. Strategi Energi Sektor AIIB secara khusus menyebutkan "bahan bakar transisi seperti gas alam atau biofuel di beberapa kasus, juga dapat dengan cepat mengurangi intensitas karbon dari bauran energi di daerah-daerah dengan kendala lokal yang signifikan".³⁸ Baik pendanaan langsung ke Tangguh LNG oleh ADB pada 2005 dan 2016 dan pendanaan tidak langsung melalui IIF dilakukan berdasarkan Kebijakan Energi tahun 1985 dan 2009, yang tidak melarang bank untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hulu migas. Namun, Kebijakan Energi 2021 ADB saat ini tetap tidak mencegah ADB untuk berinvestasi di fasilitas produksi ketiga (train 3) dan bahkan mungkin fasilitas produksi keempat (train 4), karena kebijakan tersebut masih memperbolehkan dukungan untuk investasi di hulu dan hilir gas, di mana umumnya fasilitas produksi LNG diklasifikasikan. Selain

itu, pembatasan terhadap proyek-proyek hulu dan hilir gas terkait keselarasan proyek dengan NDC dan LTS suatu negara, keberadaan alternatif, dan kelayakan ekonomi tetap memungkinkan ADB untuk terus berinvestasi dalam Tangguh LNG karena interpretasi yang luas terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Secara gabungan, Metodologi Penyelarasan Paris dan kebijakan-kebijakan para bank pembangunan multilateral terkait energi memungkinkan pendanaan publik terus mengalir ke proyek-proyek gas fosil. Kebijakan bank-bank pembangunan multilateral ini ditetapkan dengan kesadaran ada kebutuhan mendesak untuk segera beralih ke energi terbarukan yang berkelanjutan. Kebutuhan mendesak untuk menghindari semakin buruknya dampak krisis iklim dan memastikan keamanan energi untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Pada saat penulisan ini, ADB sedang melakukan tinjauan tengah periode Kebijakan Energi-nya, sementara Grup Bank Dunia sedang membahas perubahan pada Dokumen Arah Sektor Energi-nya. Ini merupakan peluang bagi bank-bank tersebut untuk benar-benar selaras dengan ambang batas 1.5°C. Kedua bank tersebut telah membuat komitmen untuk membatasi pendanaan infrastruktur migas hulu dan hilir. Pada 2024, tidak ada bank-bank pembangunan multilateral yang mendanai secara langsung proyek gas mana pun. Namun, sinyal saat ini menunjukkan bahwa ADB dan WBG mungkin akan bergerak ke arah berlawanan karena beberapa direktur eksekutif kedua bank

tersebut secara aktif mendorong pendekatan 'teknologi-netral' dalam akses pendanaan proyek-proyek energi.³⁹

Selama 'konsultasi' yang diselenggarakan oleh ADB terkait tinjauan tengah periode Kebijakan Energi-nya di sela-sela Asia Clean Energy Forum pada Juni 2025, management ADB menyatakan bahwa bank tersebut masih berencana untuk membiayai sektor hulu dan hilir gas fosil untuk lima tahun ke depan dan berniat untuk mendanai fasilitas pengurangan metana untuk infrastruktur hulu dan hilir migas yang sudah ada.⁴⁰ Mendukung pengurangan metana di hulu mungkin terdengar sebagai langkah yang bijaksana. Namun, efisiensi keseluruhan yang meningkat dari infrastruktur minyak dan gas hulu dapat memperpanjang usia operasional proyek-proyek tersebut. Hal ini dapat berpotensi menghambat kebutuhan mendesak untuk beralih ke energi terbarukan. ADB harus memastikan bahwa bank tersebut menepati komitmennya dan tidak akan mendanai proyek pengurangan metana di lapangan minyak dan produksi gas, dan bahwa proyek yang didukung harus menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca bersih dan tidak memperpanjang umur lapangan produksi minyak atau gas yang sudah ada jika ingin melanjutkan penambahan ini dalam Revisi Kebijakan Energi.

Sementara itu, pernyataan terbaru dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Bank Dunia akan mempertimbangkan ulang keputusan mereka pada 2017 untuk menghentikan investasi di proyek-proyek gas hulu. Meskipun Bank Dunia berencana untuk mendukung proyek energi nuklir, para eksekutifnya sedang aktif mendiskusikan apakah Bank Dunia seharusnya kembali mendanai infrastruktur gas hulu. Jika diadopsi, perubahan-perubahan ini akan menandai langkah mundur yang signifikan dalam komitmen iklim Bank Dunia.



Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok, berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Foto oleh Melvinas Priananda/Trend Asia.

Jebakan Tangguh: Bagaimana risiko gas mengalihkan transisi energi Indonesia

Seiring narasi gas sebagai 'jembatan' transisi energi didengungkan, berbagai dokumen energi milik pemerintah Indonesia memproyeksikan peningkatan angka kebutuhan energi kotor ini setidaknya hingga 2060.⁴¹ Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia seharusnya menjadi panduan untuk meningkatkan ambisi dalam adaptasi dan mitigasi. Nyatanya, ENDC tersebut memasukkan penggunaan pembangkit listrik berbasis gas sebagai bagian dari rencana aksi mitigasi. ENDC menunjukkan bahwa porsi gas dalam bauran energi harus minimal 22% pada 2025 dan minimal 24% pada 2050.⁴²

Bauran ketenagalistrikan Indonesia pada 2024 sangat didominasi energi kotor fosil, salah satunya gas. Per Oktober 2024, total kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 75 GW, di antaranya 30% (21,7GW) ditopang oleh pembangkit gas, sedangkan energi terbarukan hanya 12% (8,6GW).⁴³

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, diperkirakan Indonesia masih akan menambah sekitar 10,3 GW pembangkit listrik berbasis gas—naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan dokumen sebelumnya.⁴⁴ RUPTL 2025-2034 juga menyebutkan Tangguh fasilitas

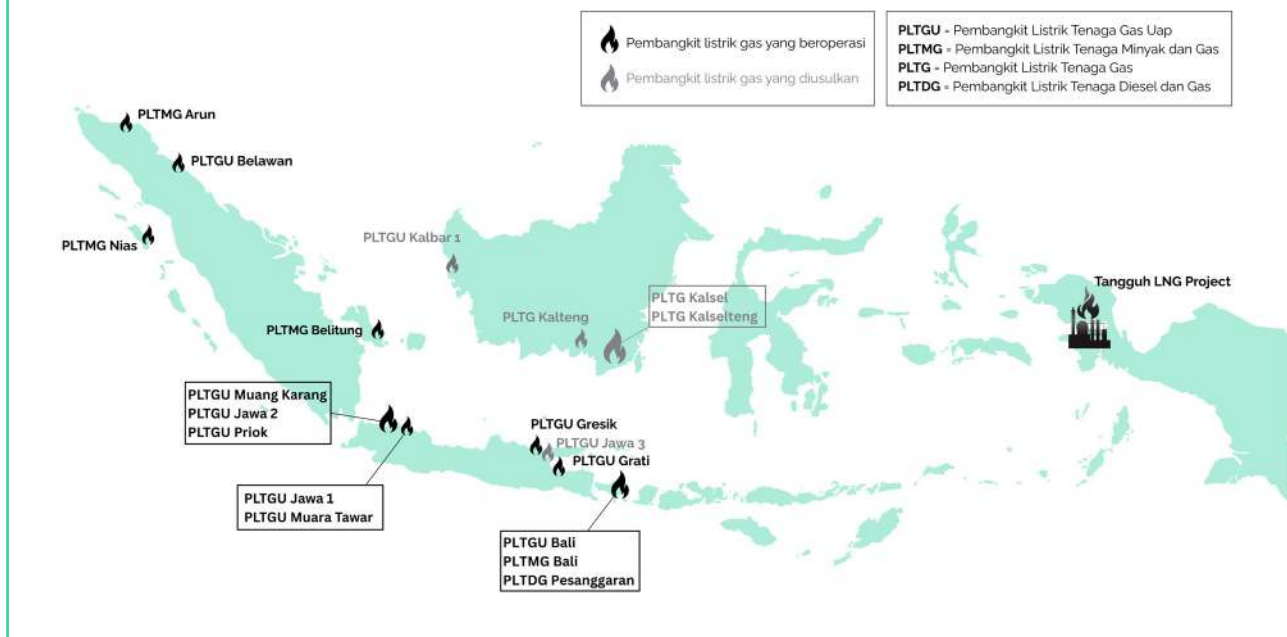
produksi ketiga dan keempat (train 3 dan 4) akan memungkinkan peningkatan kapasitas listrik yang lebih besar, termasuk untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya jika telah beroperasi.⁴⁵ Proyeksi perluasan pembangkit listrik berbasis gas menunjukkan peningkatan signifikan dalam emisi GRK selama dekade mendatang, berpotensi menggagalkan target iklim nasional dan global.

Proyek Tangguh LNG memainkan peran penting dalam ketergantungan Indonesia pada gas fosil. Total kapasitas dari ketiga kilang produksinya mencapai 11,4 mtpa,⁴⁶ berkontribusi sekitar sepertiga dari total produksi gas nasional, sekitar 33% dari produksi tahunan dialokasikan untuk kebutuhan domestik.⁴⁷ Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan penghasil dan distribusi listrik milik pemerintah Indonesia, merupakan salah satu konsumen utama penggunaan LNG domestik yang disuplai oleh Tangguh LNG. Rata-rata Tangguh memasok LNG ke PLN sekitar 60 kargo melalui kontrak penjualan per tahunnya.⁴⁸ Empat belas pembangkit listrik gas di beberapa wilayah yang dipasok LNG oleh Tangguh LNG melalui Floating Storage Regasification Units (FSRU) (lihat gambar 4).

Gambar 4: Kemana LNG Tangguh Pergi?

Pembangkit yang sudah beroperasi PLTGU Muara Karang, PLTGU Priok, PLTGU Jawa 2, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Jawa-1, PLTGU Gresik, PLTGU Grati, PLTGU Bali, PLTMG Bali, PLTDG Pesanggaran, PLTMG Arun, PLTGU Belawan, PLTMG Nias, PLTMG Belitung, dan beberapa pembangkit yang belum beroperasi seperti PLTGU Jawa-3, PLTG Kalsel, PLTG Kalteng, PLTGU Kalbar 1, PLTG Kalselteng.

Keterangan: LNG yang disuplai dari Tangguh LNG ke pembangkit-pembangkit listrik di atas melalui beberapa fasilitas FSRU. Tangguh LNG juga direncanakan akan memasok beberapa pembangkit lainnya yang belum beroperasi.⁴⁹



Tangguh LNG terus lanjut memperluas proyeknya. Unit produksi LNG ketiganya resmi beroperasi pada November 2023.⁵⁰ Sejak 2013, perusahaan tengah mempersiapkan rencana untuk pembangunan unit produksi LNG keempat (train 4).⁵¹ Selain fasilitas produksi keempat (train 4) Tangguh, juga sedang direncanakan untuk membangun fasilitas CCUS (lihat kotak 2). Pada September 2023, BP Berau menandatangani nota kesepahaman bersama dengan GE Vernova, CARBONCO, PLN Nusantara and Jawa 1 (dimiliki oleh Pertamina, Marubeni, dan Sojitz) untuk melakukan uji kelayakan mengenai pengintegrasian CCUS ke dalam industri gas fosil Indonesia.⁵² Pada November 2024, proyek Tangguh Ubadari CCUS Compression

(Tangguh UCC) telah mencapai kesepakatan investasi akhir.⁵³ Pemilik bersama proyek Tangguh LNG setuju untuk menginvestasikan 7 juta dolar untuk pengembangan ladang gas Ubadari yang ditingkatkan dengan pemulihan gas (EGR) melalui CCUS, dan kompresor di darat. Proyek ini diperkirakan akan mulai beroperasi dan produksi secara bertahap pada 2028, dan diperkirakan akan membuka sekitar 84.9 juta kubik meter sumber gas dari Tangguh LNG. Komponen CCUS bertujuan untuk menyimpan sekitar 15 juta ton CO₂ pada fase awalnya.⁵⁴

Selain memasok LNG, proyek Tangguh telah berkontribusi dalam penyediaan pasokan listrik sekitar 4 MW melalui jaringan kabel

bawah laut milik PLN sepanjang 30 km. Listrik tersebut dibeli dengan tarif Rp450 (\$0.028) per kilowatt-hour (kWh), melayani wilayah Bintuni dan sekitarnya.⁵⁵ Perjanjian pasokan ini berlaku selama 20 tahun mulai dari tahun 2012.⁵⁶ BP dan PLN juga memiliki rencana yang sedang berjalan untuk mengembangkan dua lagi pembangkit listrik tenaga gas di wilayah lain Papua.⁵⁷ Namun, komunitas lokal menyampaikan bahwa tidak mendapat manfaat dari proyek ini. Dalam berita terbaru, Dewan Adat Papua (DAP)--organisasi adat,

mendesak BP dan SKK Migas--regulator hulu migas, untuk menepati janji mereka dalam menyediakan listrik bagi komunitas yang tinggal di pesisir Teluk Bintuni, Teluk Berau serta sekitar wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.⁵⁸ Menurut tanggapan ADB kepada permintaan untuk komentar terkait publikasi ini, PT PLN bertanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan guna memanfaatkan gas yang dialokasikan untuk masyarakat di Provinsi Papua.

Kotak 2. Apa itu CCUS dan Kenapa Bermasalah?

Alih-alih segera melepas ketergantungan pada energi kotor ini, berbagai pemangku kepentingan global termasuk lembaga keuangan seperti bank-bank pembangunan multilateral, perusahaan energi, dan pemerintah berbondong-bondong mempromosikan teknologi seperti penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS) yang diklaim sebagai mitigasi emisi sambil tetap menggunakan energi fosil, secara efektif akan memperpanjang ketergantungan yang seharusnya digantikan oleh inovasi-inovasi lain. Pemerintah Indonesia pun memberikan akselerasi dalam penggunaan teknologi di atas dengan legitimasi hukum lewat Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).⁵⁹

CCUS adalah solusi palsu,⁶⁰ yang gagal untuk mengatasi emisi metana dari fasilitas gas fosil. Teknologi ini tak ubahnya dirancang sebagai kosmetik agar terkesan lebih hijau dan upaya melindungi "keberlanjutan" kepentingan bisnis mereka. Selain itu, teknologi ini tidak selalu lebih murah dibandingkan dengan energi terbarukan dan memiliki biaya tambahan lainnya. Sebuah studi dari Stanford menemukan bahwa "ketika biaya energi, dampak kesehatan, dan emisi diperhitungkan, biaya total investasi pada penangkapan dan penghilangan karbon sekitar 9-12 kali lebih mahal daripada biaya beralih 100% ke energi terbarukan".⁶¹ Efisiensi CCUS dalam mengurangi emisi juga belum terbukti secara signifikan, karena tingkat penangkapan dari teknologi tersebut yang selalu tidak mencapai target.⁶² Ambisi untuk menggunakan gas beserta usulan teknologi palsu sebagai 'jembatan' sebelum menuju ke transisi energi sejati hanyalah jebakan yang akan tetap mengunci Indonesia dalam laju tinggi pelepasan emisi dan menggagalkan upaya iklim nasional dan global dalam menghambat krisis iklim.



Kapal Tanker LNG di Tangguh LNG. Foto oleh Environmental Justice Atlas

Dampak Kehadiran Tangguh LNG

Pengusuran dan Dampak Sosial-Ekologi bagi Masyarakat Adat

Meskipun Pemerintah Indonesia kerap kali mengklaim kehadiran industri LNG telah berkontribusi positif, efek domino terhadap menurunnya fungsi lingkungan serta sosial di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya tidak dapat dikesampingkan. Masyarakat adat disingkirkan dari kampung leluhurnya Tanah Merah dan dipindahkan ke Kampung Tanah Merah Baru dan Onar Baru.⁶³ Masyarakat adat dulunya bermata pencaharian sebagai nelayan, berburu dan mengolah sagu. Kini, banyak di antara mereka harus beralih menjadi petani akibat kehilangan akses ke sumber daya tersebut saat proyek Tangguh LNG dibangun dan dibatasi pagar pembatas.⁶⁴ Proyek tersebut juga menarik para migran dari daerah lain Indonesia untuk datang mengadu nasib di dekat lokasi proyek. Konflik muncul akibat pergeseran budaya dan terpinggirkannya penduduk asli Papua dari akses terhadap peluang ekonomi.⁶⁵

Dr Filep Wamafma, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia dari Daerah Pemilihan Papua Barat, mempertanyakan klaim BP mengenai manfaat dan kesejahteraan yang diberikan oleh proyek LNG kepada komunitas yang terpaksa pindah. Dengan menggunakan bukti dari kunjungannya ke komunitas, Dr. Wamafma menyoroti ketidaksesuaian antara laporan BP dan kondisi sebenarnya terkait kontribusi Tangguh LNG dalam hal lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, akses air bersih, dan kesejahteraan umum di komunitas yang terdampak.⁶⁶ Dalam laporan berita pada 2025, ia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengevaluasi izin proyek tersebut karena perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab sosialnya.⁶⁷

Teluk Bintuni merupakan rumah bagi hutan mangrove seluas sekitar 2,25 juta hektare, terbesar di Asia Tenggara.⁶⁸ Hutan mangrove ini sangat penting untuk menjaga fungsi ekosistem pesisir, termasuk sebagai penghasil oksigen, habitat bagi keanekaragaman laut, dan melindungi wilayah dari gelombang besar. Pembangunan proyek Tangguh LNG telah signifikan merusak hutan-hutan mangrove

tersebut.⁶⁹ Menanggapi draf laporan ini, ADB mengonfirmasi bahwa 11 hektare mangrove telah hilang.

Tanggung Independent Advisory Panel (TIAP) yang dibentuk pada 2002 untuk memberikan saran kepada BP terkait isu-isu keamanan, hak asasi kemanusiaan, tata kelola, pengelolaan pendapatan, politik dan lintas isu yang terkait dampak proyek-proyek Tangguh LNG terhadap masyarakat Teluk Bintuni dan Papua.⁷⁰ Namun, koalisi masyarakat sipil yang melakukan kampanye tentang proyek Tangguh LNG mengkritik kurangnya independensi TIAP, karena panel tersebut dibuat dan didanai oleh BP, dan kunjungan ke komunitasnya pun juga didanai oleh BP.⁷¹ TIAP juga diduga meremehkan konteks yang lebih luas terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan Indonesia, yang dapat diperburuk oleh proyek Tangguh LNG (lihat kotak 3).

Naiknya emisi gas rumah kaca

BP, perusahaan induk global dari BP Berau yang mengoperasikan Tangguh LNG, melaporkan peningkatan signifikan dalam emisi metananya pada 2023, naik 10% dibandingkan tahun 2022, terutama disebabkan meningkatkannya pembakaran gas di beberapa wilayah usaha mereka di Azerbaijan-Georgia-Türkiye termasuk Tangguh.⁷²

Metana adalah gas rumah kaca yang sangat kuat, bertanggung jawab sekitar 30% terhadap kenaikan temperatur global sejak masa industrial dimulai.⁷³ Pada 2024, kontribusi emisi metana Indonesia dari sektor minyak dan gas mencapai 1012.5 kilo ton (kT), tertinggi kedua setelah India di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.⁷⁴ Faktanya, menurut International Energy Agency (IEA) bahwa kenaikan laju temperatur dari emisi metana 86 kali lebih kuat dibandingkan emisi karbon dioksida (CO₂) dalam memerangkap panas selama rentang waktu 20 tahun, menjadikannya faktor utama penyebab krisis iklim.⁷⁵ Dengan demikian, mengurangi emisi metana dari sektor ini sangat penting untuk mengendalikan kenaikan temperatur di atas ambang batas 1.5°C, serta dapat mengurangi risiko akibat dampak dari krisis iklim.

Kotak 3. Represi ruang sipil di Papua

Proyek LNG Tangguh dikembangkan dan terus beroperasi di wilayah yang dilanda konflik dan kekerasan aparat. Perjuangan untuk hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan aspek kunci dari konflik yang sedang berlangsung di Papua. Langkah-langkah represif dan kekerasan telah diterapkan untuk menekan suara media, aktivis, dan pembela hak asasi manusia.

Pada Oktober 2024, kantor media lokal, Jubi, yang dikenal dengan liputannya tentang hak asasi manusia di Papua Barat, diserang dengan bom molotov oleh orang tak dikenal.⁷⁶ Akses media asing pun dibatasi oleh aturan yang mewajibkan mereka untuk mendapat izin sebelum memasuki "zona merah" seperti Papua Barat.⁷⁷ Dalam laporan pemantauannya pada 2024, aliansi masyarakat sipil global CIVICUS menggambarkan ruang sipil Indonesia sebagai "terhalang" karena aturan yang membatasi, penggunaan kekuatan aparat yang berlebihan, dan juga penangkapan dan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia dan aktivis, terutama di Papua. Pada 2025, pemerintah Indonesia mengkriminalisasi dan menangkap beberapa aktivis Papua karena aksi protes damai menolak tambang nikel di Raja Ampat, PT Freeport, dan industri ekstraktif lainnya, dan termasuk militerisasi di Papua Barat.⁷⁸

Pemerintah Indonesia semakin gencar mengerahkan personel militer di pelosok Papua Barat, terutama untuk mengamankan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk pertambangan dan gas fosil. Proyek Tangguh LNG dan fasilitas terkait mendapatkan status keamanan nasional tinggi melalui Objek Vital Nasional melalui Kepmen ESDM Nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2022.⁷⁹ Laporan pada 2021⁸⁰ oleh beberapa lembaga masyarakat sipil (2021) mengungkap hubungan antara proyek-proyek 'pembangunan' di Papua dan penempatan aparat militer di beberapa titik sering kali berujung kekerasan bagi warga sipil. BP Berau mengklaim bahwa mereka menggunakan strategi Integrated Community Based Security (ICBS), yang mempekerjakan warga Papua untuk keamanan sehari-hari proyek dan berkomitmen hanya akan memanggil polisi, bukan militer, dan hanya jika terjadi eskalasi masalah keamanan.⁸¹ Namun, hal ini sulit untuk diverifikasi di mana organisasi masyarakat sipil dan media lokal maupun asing, sangat dibatasi.

Pendekatan keamanan seperti ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, kerap dianggap sebagai langkah untuk menjamin stabilitas operasional proyek. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan aparat dapat berpotensi memunculkan berbagai risiko, mulai dari pembatasan ruang sipil, pelanggaran hak masyarakat adat, hingga pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola sektor keamanan di wilayah yang sarat dengan konflik. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam penempatan aparat semakin memperkuat urgensi evaluasi. Ke depan, pendekatan keamanan dalam proyek-proyek pembangunan di Papua perlu ditinjau secara menyeluruh agar mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan memastikan ruang sipil dilindungi—bukan ditekan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Proyek Tangguh LNG telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak terduga, pelanggaran HAM dan kenaikan emisi gas rumah kaca. Perluasan proyek fasilitas produksi keempat (train 4) dan pembangunan fasilitas CCUS akan memperparah dampak iklim dan menghambat transisi Indonesia ke energi terbarukan.

Saat ini bank-bank pembangunan multilateral belum membuat komitmen publik untuk mendanai pembangunan fasilitas produksi keempat (train 4) milik Tangguh. Menurut tanggapan tertulis ADB saat diminta komentar, saat ini bank belum memiliki rencana atau pembahasan untuk mendanai fasilitas produksi keempat (train 4), dan pendanaan apapun akan sesuai dengan Kebijakan Energi dan Penyelarasan Metodologi Paris mereka. Namun, kebijakan dan strategi ADB, IFC, dan AIIB terkait energi serta Penyelarasan Metodologi Paris tidak cukup kuat untuk mencegah bank-bank tersebut membiayai fasilitas produksi keempat (train 4). Pembahasan saat ini mengenai perubahan Kebijakan Energi ADB dan arah kebijakan energi Bank Dunia mengarah ke arah yang salah, tetapi para pemegang saham masih memiliki waktu untuk kembali ke arah yang benar. Peninjauan kebijakan energi AIIB yang akan datang (selambat-lambatnya pada 2027) merupakan kesempatan lain untuk memperbaiki arah, guna menempatkan bank pada jalur yang sejalan secara sejati dengan Perjanjian Paris.

Berikut langkah-langkah yang akan mengarahkan bank-bank pembangunan multilateral ke arah yang benar:

- **Bank-bank pembangunan multilateral tidak boleh mendanai ekspansi proyek Tangguh LNG ke fasilitas produksi keempat (train 4) dan fasilitas CCUS.** Sebagai gantinya, mereka seharusnya membantu Indonesia beralih dari energi fosil dan membangun kapasitas yang lebih besar untuk energi terbarukan yang berkelanjutan, aksesibel, dan sepenuhnya terbarukan.
- **Bank-bank pembangunan multilateral harus meninjau portofolio klien perantara keuangan mereka dan mendorong untuk keluar dari semua energi fosil, termasuk gas fosil.** Bank-bank tersebut harus menutup celah dalam pembiayaan perantara keuangan mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak akan mendukung ekspansi proyek Tangguh LNG ke fasilitas produksi keempat (train 4) dan fasilitas CCUS, termasuk ke proyek gas fosil lainnya, lewat pendanaan secara tidak langsung sekalipun.
 - ➔ ADB dan IFC harus meninjau klien lama mereka dan mendorong tindakan yang konkret, terukur, berjangka waktu, dan sesuai dengan Perjanjian Paris 1,5°C untuk menghentikan pendanaan bagi semua jenis energi fosil, termasuk gas fosil.
 - ➔ AIIB harus menggunakan pengaruhnya untuk mendorong penghentian serupa dalam penerbitan sekuritas utang infrastruktur oleh Bayfront dan klien lainnya.
 - ➔ IFC, khususnya, dapat memperkuat Pendekatan Ekuitas Hijau atau *Green Equity Approach* dengan memperluas cakupannya ke proyek gas fosil dan melarang klien ekuitas yang sudah ada untuk melakukan investasi baru dalam gas fosil.

- **Bank-bank pembangunan multilateral harus berkomitmen untuk mengakhiri semua pendanaan untuk energi fosil**, termasuk melalui lembaga perantara keuangan. Pada saat yang sama, para bank tersebut harus menghentikan narasi 'gas sebagai energi transisi' dan sebaliknya berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan publik guna mendukung percepatan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Langkah-langkah nyata yang perlu diambil meliputi:
 - ➔ Dalam kebijakan energi bank-bank tersebut, perluasan batasan yang ada terhadap investasi gas fosil (seperti pengecualian investasi hulu minyak dan gas) ke segmen lain dari industri minyak dan gas (hilir).
 - ➔ Menetapkan target untuk penghentian total, terikat waktu, dan cepat terhadap semua pembiayaan energi fosil, termasuk gas fosil.
 - ➔ Mengalihkan dukungan ke energi terbarukan, menghindari solusi palsu seperti CCUS.
 - ➔ Memastikan transparansi terhadap pembiayaan lembaga perantara keuangan untuk memastikan bahwa pembiayaan publik tidak akan mendukung energi fosil melalui skema pendanaan tidak langsung.
 - ➔ Melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas Metodologi Keselarasan Paris para bank tersebut, dua tahun setelah diadopsi.
- **Bank-bank pembangunan multilateral harus memperkuat mekanisme perlindungan dan akuntabilitas untuk menjamin hak-hak komunitas yang terdampak dan melindungi iklim.** Proyek Tangguh LNG memberikan pelajaran berharga tentang dampak sosial dan lingkungan negatif yang berkepanjangan dari proyek-proyek fosil berskala besar. Berikut adalah langkah-langkah nyata yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya hal serupa:
 - ➔ Melakukan audit yang benar-benar independen dan terbuka yang akan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial, termasuk dampak berbasis gender, dari proyek LNG Tangguh. Audit ini harus dilakukan bukan oleh TIAP, melainkan oleh lembaga yang tidak memiliki hubungan dengan BP dan pengembang proyek lainnya untuk menghindari konflik kepentingan dan masalah independensi. Proses ini juga harus melibatkan masyarakat lokal dan adat, dan temuan audit harus diungkapkan secara transparan, terutama kepada komunitas yang terdampak di Papua. Selain pengembang proyek, bank-bank pembangunan multilateral harus berkontribusi dalam memperbaiki dampak negatif yang mereka fasilitasi saat mendukung proyek Tangguh LNG dan perluasannya.
 - ➔ Peninjauan Kerangka Kerja Berkelanjutan (*Sustainability Framework*) IFC yang sedang berjalan harus memperkuat Standar Kinerja (*Performance Standards/PS*)⁸² yang ada untuk memastikan IFC tidak akan mendanai proyek-proyek yang akan berkontribusi memperburuk iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan hutan, termasuk melanggar hak-hak masyarakat adat. Sebuah Standar Kinerja (PS) baru untuk pembiayaan perantara keuangan yang akan meningkatkan transparansi dan pengungkapan, menilai risiko iklim, menghentikan penggunaan energi fosil, dan memperkuat akses komunitas terhadap pemulihan harus segera diadopsi.
 - ➔ Peninjauan yang sedang berlangsung terhadap mekanisme akuntabilitas ADB dan AIIB harus menghasilkan pertanggungjawaban bagi komunitas yang terdampak, khususnya dengan mengurangi hambatan akses dan memungkinkan mekanisme tersebut untuk secara proaktif melakukan penyelidikan dalam kasus di mana ruang gerak masyarakat sipil sangat terbatas.

Referensi

- 1 Nurmutia, E. (2025, February 18). Megaproyek Migas Ini Diusulkan Jalan di Era Pemerintahan Prabowo. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250218154525-4-611614/megaproyek-migas-ini-diusulkan-jalan-di-era-pemerintahan-prabowo>
- 2 Carbon Majors. (n. d.). *Carbon majors entities*. <https://carbonmajors.org/Entities>
- 3 Relevant IFC Performance Standards include Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts; Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention; Performance Standard 4: Community Health, Safety, and Security; Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement; Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources; Performance Standard 7: Indigenous Peoples and Performance Standard 8: Cultural Heritage.
- 4 WRI Indonesia. (n. d.). *Protecting the landscape of Tanah Papua*. <https://wri-indonesia.org/en/initiatives/protecting-landscape-tanah-papua>
- 5 Jong, N. H. (2024, June 7). #AllEyesonPapua goes viral to highlight threat to Indigenous forests from palm oil. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2024/06/alleysonpapua-goes-viral-to-highlight-threat-to-indigenous-forests-from-palm-oil/>; WRI Indonesia. (n. d.). *Protecting the landscape of Tanah Papua*. <https://wri-indonesia.org/en/initiatives/protecting-landscape-tanah-papua>
- 6 Global Forest Watch. (n. d.). *Indonesia-Papua*. <https://gfw.global/3lyXSOK>
- 7 Carbon Majors. (n. d.). *Carbon majors entities*. <https://carbonmajors.org/Entities>
- 8 Down to Earth. (2013, May). *Bintuni Bay communities want accountability at Tangguh*. <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/bintuni-bay-communities-want-accountability-tangguh>
- 9 Bp Indonesia. (2023, October 19). *bp ships first cargo from Indonesia's expanded Tangguh LNG facility*. https://www.bp.com/en_id/indonesia/home/news/press-releases/bp-ships-first-cargo-from-indonesias-expanded-tangguh-lng-facility.html
- 10 PT GreenCap Indonesia. (2016). *Tangguh LNG Trains 1 and 2 independent environmental and social compliance audit report*. <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/49222-001-ecar-01.pdf>
- 11 Frans, S.J.P. & Maulana, A. (2023). Concept selection and feasibility study for Tangguh carbon capture, utilization and storage/enhanced gas recovery project. <https://www.ipa.orid/en/publications/concept-selection-and-feasibility-study-for-tangguh-carbon-capture-utilization-and-storage-enhanced-gas-recovery-project>
- 12 EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research. (2024). *GHG emissions of all world countries*. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024
- 13 Fadilah, R. (2025, March 5). Salju abadi Puncak Jayawijaya akan segera punah, ini dampaknya. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4690285/salju-abadi-puncak-jayawijaya-akan-segera-punah-ini-dampaknya#:~:text=Pencairan%20gletser%20di%20Puncak%20Jayawijaya,25%20derajat%20Celsius%20per%20dekade>
- 14 Nurmutia, E. (2025, February 18). Megaproyek Migas Ini Diusulkan Jalan di Era Pemerintahan Prabowo. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250218154525-4-611614/megaproyek-migas-ini-diusulkan-jalan-di-era-pemerintahan-prabowo>
- 15 Bp. (2025). *Tangguh LNG*. https://www.bp.com/en_id/indonesia/home/who-we-are/tangguh-lng.html
- 16 Asian Development Bank. (2023, June 20). *MDBs agree principles for aligning financial flows with Paris Agreement goals*. <https://www.adb.org/news/mdbs-agree-principles-aligning-financial-flows-paris-agreement-goals>
- 17 World Bank. (n. d.). *Joint MDB methodological principles for assessment of Paris Agreement alignment*. <https://www.worldbank.org/en/publication/paris-alignment/joint-mdb-paris-alignment-approach>
- 18 Bp. (2025). *Tangguh LNG*. https://www.bp.com/en_id/indonesia/home/who-we-are/tangguh-lng.html
- 19 Asian Development Bank. (2013, September 19). *Indonesia : INO: Tangguh LNG project*. <https://www.adb.org/projects/38919-014/main#project-pds>
- 20 Asian Development Bank (2005, November). *Report and recommendation of the President to the Board of Directors. Proposed loan Republic of Indonesia: Tangguh liquefied natural gas project*. <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/38919-ino-rrp.pdf>
- 21 Birt, C., Prastowo, H., Priyambodo, D., Wolfarth, S., & Stone, J. (2019). *Delivering a step-change in imaging from Indonesia's first ocean bottom node 3D seismic survey at Tangguh*. <https://www.ipa.orid/id/publications/delivering-a-step-change-in-imaging-from-indonesia%E2%80%99s-first-ocean-bottom-node-3d-seismic-survey-at-tangguh>
- 22 Asian Development Bank (2005, November). *Report and recommendation of the President to the Board of Directors. Proposed loan Republic of Indonesia: Tangguh liquefied natural gas project*. <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/38919-ino-rrp.pdf>
- 23 Asian Development Bank. (2006, August 1). *ADB to assist in developing major natural gas project in Indonesia*. <https://www.adb.org/news/adb-assist-developing-major-natural-gas-project-indonesia>
- 24 Asian Development Bank. (2025, March 11). *Indonesia: Tangguh Liquefied natural gas expansion project*. <https://www.adb.org/projects/49222-001/main>
- 25 Asian Development Bank. (2016, November). *Report and recommendation of the President to the Board of Directors. Proposed loan HSBC Bank USA, National Association Tangguh Liquefied Natural Gas Expansion Project (Indonesia)*. <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/49222-001-rrp.pdf>
- 26 Clifford Capital. (n. d.). *Bayfront Infrastructure Capital IV*. <https://www.cliffordcapital.sg/products/BIC-IV>
- 27 Asian Development Bank. (2014, October 1). *Indonesia: Equity investment in Indonesian Infrastructure Financing Facility company project*. <https://www.adb.org/projects/42935-014/main>
- 28 International Finance Corporation. (2010, April 22). *PT Indonesia Infrastructure Finance Facility*. <https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/26443/pt-indonesia-infrastructure-finance-facility>
- 29 Bp. (2016, August 3). *Tangguh enters into financing agreements for the Train 3 project*. https://www.bp.com/en_id/indonesia/home/news/press-releases/tangguh-enters-into-financing-agreements-for-the-train-3-project.html International banks in the commercial tranche financing include affiliates of Mizuho Bank, Bank of China, China Construction Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, DBS Bank, United Overseas Bank, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, Korea Development Bank, Shinsei Bank, and KfW Bank

- 30 Asian Infrastructure Investment Bank. (2023, August 30). *Singapore: BIC IV*. <https://www.aiib.org/en/projects/details/2023/approved/Singapore-bic-iv.html>
- 31 Clifford Capital. (n. d.). *Bayfront Infrastructure Capital IV*. <https://www.cliffordcapital.sg/products/BIC-IV>
- 32 Asian Infrastructure Investment Bank. (2023, August 30). *Singapore: BIC IV*. <https://www.aiib.org/en/projects/details/2023/approved/Singapore-bic-iv.html>
- 33 Asian Infrastructure Investment Bank. (2019, July 22). *Singapore: Infrastructure private capital mobilization platform*. <https://www.aiib.org/en/projects/details/2019/approved/Singapore-Infrastructure-Private-Capital-Mobilization-Platform.html>
- 34 Indonesia Infrastructure Finance. (n. d.). *About IIF*. <https://iif.co.id/en/about-us/shareholders/>
- 35 Asian Infrastructure Investment Bank. (n. d.). *AiIB and Paris Alignment*. <https://www.aiib.org/en/how-we-work/paris-alignment/overview.html>
- 36 Asian Development Bank. (2021, July 8). *ADB commits to full alignment with Paris Agreement*. <https://www.adb.org/news/adb-commits-full-alignment-paris-agreement>
- 37 Asian Infrastructure Investment Bank. (2023, August 30). *Singapore: BIC IV*. <https://www.aiib.org/en/projects/details/2023/approved/Singapore-bic-iv.html>
- 38 Asian Infrastructure Investment Bank. (2022, November). *Energy sector strategy: Sustainable energy for tomorrow*. <https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-for-tomorrow.html>
- 39 For WBG, see Shalal, A. (2025, June 12). World Bank to end ban on nuclear energy projects, still debating upstream gas. *Reuters*. <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/world-bank-end-ban-nuclear-energy-projects-still-debating-upstream-gas-2025-06-11/> and Lanz, K. & Matile, L. (2025, June 29). *World Bank reform: Back to the future?* <https://www.alliancesud.ch/en/world-bank-reform-back-future>. For ADB, see Wright, P. K. (2025, May). *Last week I attended the Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting in Milan. A hot topic was the pending Energy Policy review* [Post]. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7328405191056121856/>
- 40 Pamintuan, M. (2025, June). *Red flags amidst green promises* [Post]. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7339156636902506496/>
- 41 Trend Asia. (2024, September 15). *Peraturan pemerintah Kebijakan Energi Nasional penuh solusi palsu dan tidak mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan*. <https://trendasia.org/peraturan-pemerintah-kebijakan-energi-nasional-penuh-solusi-palsu-dan-tidak-mendorong-transisi-energi-yang-adil-dan-berkelanjutan/>
- 42 See page 24 annex 1 of Republic of Indonesia. (2022). *Enhanced nationally determined contribution of Republic of Indonesia*. <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/ENDC%20Indonesia.pdf>
- 43 See page IV-1 of PT PLN (Persero). (2025). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034*. <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=2025kmesdm188k.pdf>
- 44 Ibid.
- 45 Ibid.
- 46 Bp. (2024, May 3). *bp tingkatkan kompetensi CCUS dan CCS di Indonesia*. https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/berita/siaran-pers/bp-tingkatkan-kompetensi-ccus-dan-ccs-di-indonesia.html
- 47 Bp. (2025, May). *Leading energy partner of Indonesia*. [https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/id_id/indonesia/home/who-we-are/bp%20Company%20Profile%20-%202025%20\(ENG\).pdf](https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/id_id/indonesia/home/who-we-are/bp%20Company%20Profile%20-%202025%20(ENG).pdf)
- 48 Bp. (2024, May 3). *bp tingkatkan kompetensi CCUS dan CCS di Indonesia*. https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/berita/siaran-pers/bp-tingkatkan-kompetensi-ccus-dan-ccs-di-indonesia.html
- 49 PT PLN (Persero). (2025). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034*. <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=2025kmesdm188k.pdf>
- 50 Bp Indonesia. (2023, November 24). *Presiden Jokowi resmikan Tangguh LNG Train 3*. https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/id_id/indonesia/home/news/press-releases/231124_Siaran%20Pers_Presiden%20Jokowi%20resmikan%20Tangguh%20LNG%20Train%203_241123.pdf
- 51 Oktarianisa, S. & Zuraya, N. (2013, February 10). *BP segera bangun Train 4 Tangguh*. *Republika*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/mhzt23/bp-segera-bangun-train-4-tangguh>
- 52 Bp Indonesia. (2023, September 11). *bp, GE Vernova, CARBONCO, PLN Nusantara dan Jawa 1 bekerja sama dalam studi kelayakan rantai nilai penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS)*. https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/id_id/indonesia/home/news/press-releases/230911_Siaran%20Pers_bp%20bekerja%20sama%20dalam%20studi%20kelayakan%20rantai%20nilai%20CCUS.pdf
- 53 Mitsubishi Corporation. (n. d.). *Indonesia's Tangguh UCC project reaches final investment decision (FID)*. <https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/news/release/2024/20241122001.html>
- 54 Bp. (n. d.). *Enhanced gas recovery/carbon capture, utilization and storage*. https://www.bp.com/en_id/indonesia/home/who-we-are/tangguh-lng/enhanced-gas-recovery-carbon-capture-utilization-and-storage.html
- 55 PT PLN (Persero). (2013, December 3). *PLN tandatangani perjanjian penyaluran dan pengambilan tenaga listrik dengan BP Tangguh*. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2013/12/pln-tandatangani-perjanjian-penyaluran-dan-pengambilan-tenaga-listrik-dengan-bp-tangguh/>
- 56 SKK Migas & Bp. (2013, December 3). *BP tandatangani perjanjian dengan PLN untuk memasok listrik bagi Teluk Bintuni*. https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/id_id/indonesia/home/news/press-releases/131203_final_bp_press_release.pdf
- 57 Bp. (2023, May 9). *Program percontohan listrik off-grid LNG Tangguh di Teluk Bintuni dan Fakfak*. https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/berita/siaran-pers/program-percontohan-listrik-off-grid-lng-tangguh-di-teluk-bintuni-dan-fakfak.html
- 58 Samagita, H. (2025, June 4). *DAP pertanyakan komitmen SKK Migas dan BP Indonesia yang tertuang di dalam dokumen AMDAL*. *Teropong News*. <https://teropongnews.com/dap-pertanyakan-komitmen-skk-migas-dan-bp-indonesia-yang-tertuang-di-dalam-dokumen-amdal/>
- 59 Setiawati, D. & Tisnadisastra, A. A. (2024, July 02). *PR 14/2024: A unified and expanded carbon capture storage regulation*. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=87fb12ab-26a8-4590-8cb2-33ed5a9a3700>
- 60 Recourse. (2024, October 15). *Banking on renewables criteria for public investment in renewable energy – with case studies from Asia and Africa*. <https://re-course.org/newsupdates/banking-on-renewables-criteria/>

- 61 Rosen, T. (2025, February 24). *New study finds carbon capture ineffective and costly compared to investing in renewable energy*. <https://environmentamerica.org/center/updates/new-study-finds-carbon-capture-ineffective-and-costly-compared-to-investing-in-renewable-energy/>
- 62 IEFA. (2024). *Carbon capture and storage. An unproven technology that cannot meet planetary CO2 mitigation needs*. <https://ieefa.org/ccs>.
- 63 Bp. (2016, September). *Resettlement and Indigenous Peoples plan. Proposed loan Tangguh liquefied natural gas expansion project (Republic of Indonesia)*. <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/49222-001-remdp-02.pdf>
- 64 Rohman, M. S. (2017, October 28). *Green belt of bintuni bay ethnographic studies on the introducing program for the implementation of carbon emissions reduction in Bintuni Bay Regency, West Papua*. <https://igsci.pasca.ugm.ac.id/green-belt-of-bintuni-bay-ethnographic-studies-on-the-introducing-program-for-the-implementation-of-carbon-emissions-reduction-in-bintuni-bay-regency-west-papua/>
- 65 Setiadi, S. & Sumini, S. (2023). The more people come, the harder lives become: migration to the villages around the LNG Tangguh project, Papua. *Kritika Kultura*, 40(28). <https://doi.org/10.13185/1656-152x.2038>
- 66 Wamafma, F. (2024). Justice perspectives on BP Tangguh's claim to corporate social responsibility in Bintuni Bay. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e3014. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3014>; Wamafwa, F., Mansawan, I. S. K., & Bonggoibo, A. A. (2024). The role of Tangguh Development projects in achieving welfare for the Papuan community. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), 1-19. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-004>; Redaksi. (2023, May 06). Senator Filep tanggapi rilis kontribusi BP Tangguh untuk Papua. *Jaga Papua*. <https://jagapapua.com/article/detail/7746/senator-filep-tanggapi-rilis-kontribusi-bp-tangguh-untuk-papua>
- 67 Ichsan, A. N. & Supar, E. (2025, May 20). DPD RI desak Pemprov Papua Barat evaluasi perusahaan BP Tangguh. *Antara Papua Tengah*. <https://papatengah.antaranews.com/berita/65241/dpd-ri-desak-pemprov-papua-barat-evaluasi-perusahaan-bp-tangguh>
- 68 Raharusan, A. & Galuwu, K. (2024, June 28). Melindungi hutan mangrove di Teluk Bintuni. *Jubi*. <https://jubi.id/domberai/2024/melindungi-hutan-mangrove-di-teluk-bintuni/>
- 69 Alfian, A. (2023, April 18). Proyek LNG Tangguh di Teluk Bintuni terindikasi rusak ekosistem mangrove, haris pertama: Ini pelanggaran undang-undang. *Rmol*. <https://rmol.id/politik/read/2023/04/18/571141/proyek-lng-tangguh-di-teluk-bintuni-terindikasi-rusak-ekosistem-mangrove-haris-pertama-ini-pelanggaran-undang-undang>
- 70 Bp. (2002). *BP response to the first report on the Tangguh LNG Project*. https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/en_id/indonesia/home/news/reports/2002_en_bp_response_to_tiap_report.pdf
- 71 Down to Earth. (2004, February). *The Tangguh gas project: What hope for human rights protection in a worsening political climate?* <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/tangguh-gas-project-what-hope-human-rights-protection-worsening-political-climate>
- 72 Bouso, R. & Wakil, D. (2024, March 9). BP's carbon emissions rise for the first time since 2019. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/bps-operational-emissions-edge-higher-2023-2024-03-08/>
- 73 International Energy Agency. (2025, May). *Global methane tracker 2025*. <https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2025>
- 74 International Energy Agency. (2025, March 24). *Methane emissions from the fossil fuel sector in South and Southeast Asia, 2024*. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/methane-emissions-from-the-fossil-fuel-sector-in-south-and-southeast-asia-2024>
- 75 International Energy Agency. (2020, October). *World energy outlook 2020*. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>
- 76 Human Rights Monitor. (2024, November 4). *Attack on Jubi office raises alarms over press freedom in Papua*. <https://humanrightsmonitor.org/case/attack-on-jubi-office-raises-alarms-over-press-freedom-in-papua/>
- 77 Alaidrus, F. (2025, June 20). *Journalists face new restrictions in Indonesia*. <https://globalpressjournal.com/asia/indonesia/journalists-face-new-restrictions-indonesia/>
- 78 Civicus. (2025, July 17). *Indonesia: Civic space regresses with targeting of activists, brutal crackdown on protests and problematic law revisions*. <https://monitor.civicus.org/explore/indonesia-civic-space-regresses-with-targeting-of-activists-brutal-crackdown-on-protests-and-problematic-law-revisions/>
- 79 Ministry of Energy and Mineral Resources. (2022). *Perubahan ketiga atas keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 77/k/90/mem/2019 tentang objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral*. <https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Kepmen%20ESDM%20No.%2020270.K-HK.02-MEM.S-2022.pdf>
- 80 Trend Asia. (2021, August 1). *Ekonomi politik penempatan militer di Papua*. <https://trendasia.org/ekonomi-politik-penempatan-militer-di-papua/>
- 81 Mckenna, K. (2015, September 4). *BP, security and human rights in West Papua*. *New Mandala*, <https://www.newmandala.org/bp-security-and-human-rights-in-west-papua/>
- 82 Relevant IFC Performance Standards include Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts; Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention; Performance Standard 4: Community Health, Safety, and Security; Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement; Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources; Performance Standard 7: Indigenous Peoples and Performance Standard 8: Cultural Heritage.
- 83 Trend Asia. (2024, September 15). *Peraturan pemerintah Kebijakan Energi Nasional penuh solusi palsu dan tidak mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan*. <https://trendasia.org/peraturan-pemerintah-kebijakan-energi-nasional-penuh-solusi-palsu-dan-tidak-mendorong-transisi-energi-yang-adil-dan-berkelanjutan/>
- 84 See page 24 annex 1 of Republic of Indonesia. (2022). *Enhanced nationally determined contribution of Republic of Indonesia*. <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/ENDC%20Indonesia.pdf>
- 85 See page IV-1 of PT PLN (Persero). (2025). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034*. <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=2025kmesdm188k.pdf>
- 86 Ibid.
- 87 Ibid.
- 88 Bp. (2024, May 3). *bp tingkatkan kompetensi CCUS dan CCS di Indonesia*. https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/berita/siaran-pers/bp-tingkatkan-kompetensi-ccus-dan-ccs-di-indonesia.html

RECOURSE

Making finance accountable to people and planet

Krajenhoffstraat 137A 1018 RG
Amsterdam, The Netherlands

www.re-course.org

